

**EVALUASI RETROSPEKTIF PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
(PKH) BIDANG PENDIDIKAN DALAM MENGENTASKAN  
KEMISKINAN DI KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG**

Sri Wahyu Pratiwi, Retno Sunu Astuti, R.Slamet Santoso

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1296

Telpon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <https://www.fisip.undip.ac.id>. Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*The Family Hope Program (PKH) is a program aimed at addressing poverty for the poor through the provision of cash assistance with conditions and criteria that must be met by PKH participants, and PKH participants must commit to carrying out their obligations as PKH recipients. The Family Hope Program (PKH) in Rembang Regency was implemented starting November 24, 2011 simultaneously in all subdistricts in Rembang Regency, including in Sarang District, but its implementation has not been maximized. Therefore, the purpose of this study was to see the performance of PKH in the field of education in alleviating poverty in Sarang District, Rembang Regency. This study conducted a retrospective evaluation to see again whether PKH assistance in education had achieved its goals. The research method used is qualitative with data collection techniques through interviews, documentation, and observation. The results showed that the target of PKH beneficiaries in Sarang District had reached 95% on target, but for the effectiveness of PKH assistance, PKH beneficiaries had utilized the financial assistance provided to meet school needs and needs, but some were used for daily needs. day. In addition, the problem of disbursing aid funds experiencing delays and dependence on receiving assistance makes it difficult for PKH beneficiaries to carry out socialization and education for PKH membership graduation. Suggestions in this study are monitoring and mentoring to ensure that any assistance funds provided are properly used and awareness for PKH beneficiaries to want to graduate when their welfare has increased so that they are no longer dependent on the assistance provided.*

**Keywords: Restrospective Evaluation; PKH; Poverty**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang sangat besar. Indonesia menempati urutan keempat di dunia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2019 sekitar 269 Juta atau 3,49% total populasi penduduk di dunia.

Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang menempati posisi keempat di dunia menjadi tantangan bagi Indonesia. Salah satunya yaitu permasalahan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2019 sebanyak 24,79 juta dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,22%. Kemiskinan biasanya di tandai dengan rendahnya kualitas hidup masyarakat, masih banyaknya pengangguran, masih rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat, serta keterbelakangan masyarakat.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah dengan angka kemiskinan yang masih cukup

tinggi. Salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi adalah Kabupaten Rembang. Berdasarkan data Susenas 2019, Kabupaten Rembang menempati posisi ke-6 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Berdasarkan data Susenas 2018-2019 BPS Kabupaten Rembang, pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin terdapat 95,26 ribu orang atau 14,95% dari total penduduk. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Rembang juga diperkuat dengan adanya empat kecamatan yang masih berada pada zona merah kemiskinan dan menjadi kecamatan prioritas I dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang, diantaranya yaitu Kecamatan Sarang, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Kragan, dan Kecamatan Sedan.

Kebijakan sosial yang dikembangkan untuk melindungi risiko dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, menangani kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH ditujukan kepada masyarakat

miskin dengan memberikan bantuan uang tunai dengan kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta PKH, dan peserta PKH wajib berkomitmen untuk melaksanakan kewajibannya sebagai penerima PKH.

Pelaksanaan PKH di Indonesia dilaksanakan sejak tahun 2007. Kabupaten Rembang melaksanakan Program Keluarga Harapan sejak 24 November 2011 di seluruh kecamatan Kabupaten Rembang. Kecamatan Sarang juga menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya untuk menangani masalah kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, total penerima PKH di Kecamatan Sarang yaitu sebanyak 3.342 rumah tangga.

Pelaksanaan PKH di bidang pendidikan berfokus pada 2 bidang, yaitu mewujudkan peningkatan pendidikan anak usia sekolah dan mengurangi angka putus sekolah. Jumlah lulusan murid pada jenjang yang lebih tinggi di Kecamatan Sarang tergolong masih rendah.

Berdasarkan data dari Disdikpora Kabupaten Rembang tahun 2020, jumlah lulusan murid SD/SMP/SMA di Kecamatan Sarang yaitu lulusan SD sebanyak 771, lulusan SMP sebanyak 335, dan lulusan SMA hanya berjumlah 57 siswa.

Pelaksanaan PKH di lapangan, juga memunculkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) yaitu data base tidak akurat. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya penerima bantuan yang kondisinya ekonominya mampu tetapi mendapatkan bantuan tersebut. Persoalan selanjutnya yaitu bantuan PKH yang diterima tidak digunakan dengan semestinya. Selain itu KPM PKH sulit menerima sosialisasi yang diberikan oleh pendamping PKH.

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang maka perlu adanya evaluasi retrospektif terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sarang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kinerja Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang?
2. Apa faktor penghambat kinerja Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis kinerja Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat kinerja Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

## **D. Kajian Teori**

### **1. Kebijakan Publik**

Thomas R. Dye (dalam Sari dan Aufarul, 2020 : 6) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah segala bentuk

tindakan yang dibuat atau tidak diperbuat oleh pemerintah. J Anderson (dalam Sari dan Aufarul, 2020 : 6) mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai suatu peraturan bentuk keputusan yang telah dirumuskan oleh lembaga pemerintahan.

Kebijakan publik dalam prosesnya terdapat beberapa langkah dalam hal pengambilan dan menetapkan sebuah keputusan. Menurut William Dunn dalam (Winarno, 2012 : 35-37), tahapan proses dalam pembuatan kebijakan publik yaitu tahap penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Pada tahap penyusunan agenda, para perumus kebijakan melakukan seleksi terhadap masalah-masalah yang ada menurut tingkat urgencitas kemudian diproses ke dalam pembahasan agenda kebijakan. Tahap selanjutnya, analisis akan menentukan kemungkinan kebijakan untuk memecahkan masalah, yakni di tahap perumusan kebijakan dengan prosedur *forecasting*. Selanjutnya, berbagai alternatif yang ada diproses

dengan memilih salah satu alternatif yang akan diadopsi menjadi kebijakan.

Setiap kebijakan yang sudah diputuskan oleh para perumus kebijakan sebagai alternatif pemecahan masalah, kemudian dilaksanakan di lapangan. Kebijakan yang telah diimplementasikan selanjutnya dilakukan penilaian atau evaluasi guna mengamati dan mengukur sudah sejauh mana kebijakan yang ada telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat memecahkan masalah.

## **2. Evaluasi Kebijakan**

Subarsono (2016: 119) juga memberikan pendapat mengenai evaluasi yaitu suatu kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu program atau kebijakan publik. Subarsono (2016 : 120-122) mengemukakan tujuan evaluasi kebijakan diantaranya yaitu menilai kinerja suatu program atau kebijakan, mengetahui tingkat efisiensi kebijakan, mengukur tingkat keluaran (*outcome*) kebijakan, menilai dampak dan manfaat yang ditimbulkan dari suatu kebijakan, menghindari adanya penyimpangan,

dan masukan untuk proses pengambilan kebijakan yang akan datang.

Dunn menjelaskan bahwa ada beberapa pendekatan dalam evaluasi kebijakan publik, diantaranya :

- a. Evaluasi semu. Asumsi utama dari model evaluasi ini adalah bahwa ukuran tentang manfaat dan nilai merupakan suatu yang dapat terbukti sendiri oleh ukuran masing-masing individu, kelompok atau pun masyarakat.
- b. Evaluasi formal. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target yang diumumkan secara formal merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.
- c. Evaluasi keputusan teoritis adalah pendekatan evaluasi kebijakan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan valid menangani hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

Terdapat variasi-variasi model evaluasi kebijakan formal, diantaranya :

- 1) Evaluasi perkembangan , yang berupaya menunjukkan kegiatan evaluasi kebijakan secara eksplisit yang diciptakan untuk melayani kebutuhan sehari-hari staf program.
- 2) Evaluasi proses restrospektif, yang meliputi pemantauan/evaluasi program setelah program tersebut diterapkan untuk jangka waktu tertentu.
- 3) Evaluasi eksperimental, adalah evaluasi kebijakan yang lahir dari hasil kondisi kontrol langsung terhadap masukan dan proses kebijakan.
- 4) Evaluasi hasil restrospektif, yang meliputi pemantauan dan evaluasi hasil tetapi tidak disertai dengan kontrol langsung terhadap masukan-masukan dan proses kebijakan yang dapat dimanipulasi.

### **3. Program Keluarga Harapan**

Menurut KEMSOS Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang tujuan untuk menangani kemiskinan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin melalui pemberian bantuan uang tunai dengan persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh

peserta PKH, dan peserta PKH wajib berkomitmen untuk melaksanakan kewajibannya sebagai penerima PKH.

Penerima PKH dibedakan berdasarkan tiga komponen yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Masing-masing komponen memiliki beberapa rincian tersendiri diantaranya sebagai berikut:

- 1) Komponen kesehatan
  - a. Ibu hamil / nifas / menyusui
  - b. Anak usia dini, yaitu anak dengan rentang usia antara 0-6 tahun yang belum bersekolah.
- 2) Komponen pendidikan
 

Kriteria komponen pendidikan yaitu anak usia sekolah dengan usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar.
- 3) Komponen kesejahteraan sosial
  - a. Komponen lanjut usia
  - b. Penyandang disabilitas berat

Masing masing dari keluarga penerima manfaat juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH. Hak peserta PKH diantaranya yaitu menerima bantuan sosial; pendampingan sosial; pelayanan di fasilitas kesehatan,

pendidikan, dan kesejahteraan sosial; Program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Kewajiban yang harus dipenuhi peserta PKH yaitu :

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 5 tahun 11 bulan.
- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun.
- c. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Lokus penelitian berada di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Informan dari penelitian ini yaitu masyarakat Kecamatan Sarang,

penerima PKH, pendamping PKH Kecamatan Sarang, Pemerintah Kecamatan Sarang, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Rembang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Evaluasi Retrospektif Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan**

#### **1. Pemetaan Sasaran**

Sasaran dalam suatu program atau kebijakan menjadi salah satu indikator penting dalam merumuskan suatu kebijakan. Penentuan sasaran yang tepat dalam merumuskan suatu kebijakan dapat mempengaruhi keberlangsungan suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya. Sasaran dalam program keluarga harapan di Kecamatan Sarang adalah keluarga miskin yang memenuhi salah satu dari tiga kriteria komponen PKH kepesertaan PKH, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Penetapan peserta PKH didasarkan pada data kemiskinan yaitu Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial (DTKS). Hal ini mengakibatkan beberapa dari masyarakat yang belum mampu ada yang namanya belum terdaftar sebagai penerima bantuan PKH sehingga tidak mendapatkannya dan sebaliknya. Di sisi lain, para pendamping PKH juga tidak dapat mengajukan nama-nama masyarakat kurang mampu, yang belum mendapatkan bantuan PKH, sebab data peserta PKH sudah ada pada data DTKS.

Menanggapi hal tersebut, maka dalam pelaksanaan PKH terdapat *exclusion error* dan *inclusion error*. *Exclusion error* merupakan rumah tangga yang layak secara sosial ekonomi, dan demografi untuk menerima PKH namun tidak termasuk dalam daftar penerima. Sedangkan *inclusion error* dapat diartikan sebagai rumah tangga yang secara ekonomi sosial dan demografi tidak memenuhi persyaratan untuk menerima PKH namun termasuk dalam daftar penerima.

Tujuan dari program keluarga harapan bidang pendidikan di Kecamatan Sarang untuk membantu masyarakat dalam memperoleh akses

pendidikan dan meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sekolah juga sudah tercapai, walaupun jumlah lulusan murid pada jenjang yang lebih tinggi masih tergolong rendah.

Guna meminimalisir terjadinya ketidaktetapan sasaran penerima PKH, maka dilakukan graduasi peserta PKH. Graduasi peserta PKH merupakan pencabutan hak seseorang dari kepesertaan PKH karena dianggap ekonominya sudah mampu dan tidak tepenuhinya komponen. Akan tetapi kondisi di lapangan untuk menentukan seseorang tersebut dapat dilakukan graduasi cukup sulit sebab indikator kemiskinan masing-masing desa berbeda.

## **2. Pemetaan Hambatan**

Suatu program ataupun kebijakan yang diimplementasikan di lapangan tidak selalu berjalan dengan baik, tentu didalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa keterbatasan serta kendala.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sarang dalam keberjalanannya masih ditemukan beberapa keterbatasan ataupun



kendala didalamnya. Masalah keterbatasan yang dialami terutama yaitu masalah ketepatan data. Masyarakat penerima bantuan PKH antara data DTKS dengan kondisi di lapangan terkadang tidak sesuai, sehingga dalam pengimplementasiannya ditemui penerima bantuan PKH dari masyarakat yang tergolong mampu dan yang belum mampu justru tidak mendapatkannya.

Keterbatasan selanjutnya yaitu terkait dengan persoalan pencairan dana. Terkadang, beberapa peserta PKH ketika bantuan PKH sudah cair, beberapa dari mereka ada yang saldonya masih kosong dan ada juga yang tidak cair.

Pelaksanaan PKH bidang pendidikan di Kecamatan Sarang dalam keberjalanannya juga ditemui kendala. Kendala pertama yaitu pola pikir masyarakat yang sulit untuk diubah. Masyarakat penerima PKH cenderung susah untuk dilakukan graduasi. Ketika penerima PKH yang dianggap sudah layak dan mampu maka harus dicabut dari kepesertaan PKH akan tetapi mereka tidak mau.

Kendala selanjutnya yaitu kurangnya kesadaran peserta PKH

yang sudah tidak memiliki komponen untuk lapor bahwa dirinya sudah tidak layak lagi menerima bantuan PKH tersebut. Adanya bantuan PKH menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat yang menerimanya ditandai dengan sikap peserta PKH yang tidak ingin dicabut dari kepesertaannya padahal mereka dianggap sudah mampu.

### **3. Analisis Dampak**

Suatu kebijakan ataupun program disusun untuk memberikan manfaat bagi sasaran yang dituju. Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan ditujukan kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan serta meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.

Adanya Program Keluarga Harapan (PKH) pendidikan, memberi pengaruh yang baik bagi para penerima PKH di Kecamatan Sarang. Masyarakat penerima PKH bidang pendidikan dapat memanfaatkan dana bantuan PKH untuk membiayai kebutuhan dan keperluan sekolah,

akan tetapi beberapa dari penerima PKH memanfaatkan dana bantuan untuk kebutuhan dasar dan pribadinya.

Manfaat Program Keluarga Harapan juga dirasakan masyarakat, dimana yang awalnya mereka hanya dapat menyekolahkan anaknya pada jenjang SD/SMP dengan adanya PKH mereka dapat menyekolahkan anaknya sampai pada jenjang SMA, dan tingkat kesadaran masyarakat juga meningkat akan pentingnya pendidikan.

Manfaat yang didapat dari bantuan PKH memunculkan dampak dalam pelaksanaan PKH. Pertama, kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Hal ini terlihat dari daya beli masyarakat yang meningkat dan peningkatan taraf pendidikan masyarakat Kecamatan Sarang. Adanya kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH juga membantu merubah pola pikir dari masyarakat untuk sadar akan pentingnya pendidikan.

Pelaksanaan PKH bidang pendidikan di Kecamatan Sarang juga menimbulkan pengaruh yang kurang baik, dimana masyarakat penerima

PKH cenderung merasa nyaman dengan bantuan yang diterima sehingga tidak mau untuk dilakukan graduasi.

## **B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Harapan Keluarga**

### **1. Standar dan sasaran kebijakan**

Standar dan sasaran kebijakan dalam penelitian ini adalah untuk melihat siapa yang menerima bantuan dan apakah sudah tepat sasaran atau belum. Program Keluarga Harapan dalam pelaksanaannya sudah menentukan beberapa kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan PKH.

Syarat pertama untuk menentukan warga tersebut berhak menerima bantuan PKH adalah warga yang namanya masuk pada data kemiskinan desa yang menandakan bahwa masyarakat tersebut miskin walaupun untuk penentuan akhir kepesertaan PKH tetap pusat yang menentukan. Selain data dari pusat, pendamping PKH memiliki tugas untuk dapat membantu pemerintah pusat dalam menentukan sasaran penerima PKH.

Standar penetapan calon peserta PKH ditentukan melalui musyawarah desa di desa masing-masing sehingga masyarakat penerima PKH adalah mereka yang benar-benar kondisi ekonominya kurang mampu dan memenuhi kriteria kepesertaan PKH. Kegiatan *visit door to door* juga dilakukan oleh pendamping PKH untuk melihat langsung kondisi perekonomian masyarakat penerima PKH. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa penerima PKH adalah mereka yang benar-benar kurang mampu ekonominya dan memenuhi kriteria kepesertaan PKH.

## **2. Sumber daya**

Sumberdaya yang menunjang keberhasilan Pelaksanaan PKH bidang pendidikan di Kecamatan Sarang salah satunya adalah sumberdaya manusia. Masyarakat penerima PKH Kecamatan Sarang dan pendamping PKH sama-sama mendukung pelaksanaan PKH di Kecamatan Sarang.

Hal tersebut dilihat dari kepatuhan masyarakat yang mampu memenuhi kewajibannya sebagai penerima PKH dengan

menyekolahkan anaknya. Selain itu, pendamping PKH juga memberikan edukasi kepada para penerima PKH yang disalurkan melalui kegiatan pendampingan yang dilakukan secara berkala. Para pendamping PKH melakukan kegiatan pertemuan dengan para penerima PKH setiap 1 bulan sekali, dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait apa saja yang menjadi kewajiban peserta PKH dan informasi seputar PKH.

Pendamping PKH juga terjun langsung ke sekolah-sekolah untuk melakukan absensi apakah anak dari penerima PKH tersebut rajin masuk sekolah dan benar-benar sekolah disekolah tersebut sesuai dengan data yang ada. Apabila anak dari penerima PKH tidak memenuhi kewajibannya, maka bantuan yang diberikan akan ditangguhkan.

## **3. Hubungan antar Organisasi**

Adapun yang dimaksud hubungan antar organisasi disini adalah hubungan yang terjalin antar *stakeholder* dalam menjalankan PKH di Kecamatan Sarang dan kegiatan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari program yang dijalankan.

Pendamping PKH dalam menyampaikan maksud dan tujuan PKH adalah dengan melakukan pertemuan kelompok dengan penerima PKH.

Pendamping PKH melakukan kegiatan sosialisasi seputar informasi PKH, sosialisasi pemanfaatan dana bantuan, kewajiban yang harus dipenuhi oleh para penerima PKH, dan saling *sharing* kendala-kendala yang dialami ketika menjadi peserta PKH. Selain itu, pendamping PKH juga melakukan evaluasi dan monitoring pemanfaatan dana kepada para KPM PKH setiap kali dana bantuan cair

#### **4. Karakteristik Agen Pelaksana**

Kinerja suatu kebijakan dari organisasi pelaksana dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Berdasarkan hasil penelitian, kinerja dari pendamping PKH dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Sarang sudah berjalan dengan baik. Para pendamping yang memiliki peranan penting dalam keberjalanan program ini sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya.

Pendamping PKH sudah berperan dalam memberikan edukasi, pemahaman, dan pengarahan kepada peserta PKH. Mereka menjadi fasilitator para penerima PKH dengan memberikan edukasi terkaitnya pentingnya pendidikan, kesehatan, dan terkait dengan pemanfaatan dana bantuan. Selain itu, ketika penerima PKH memiliki kendala dalam kepesertaannya, mereka dengan sigap dan responsif membantu memberikan solusi sehingga permasalahan yang ada dapat diatasi.

#### **5. Disposisi atau Sikap Pelaksana**

Pelaksanaan suatu kebijakan publik sangatlah dipengaruhi oleh sikap dari para pelaksana kebijakan baik itu berupa sikap penerimaan ataupun penolakan. Sikap dari para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan PKH bidang pendidikan di Kecamatan Sarang sangat baik dalam mendukung tercapainya tujuan PKH.

Para pendamping PKH menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Para pendamping PKH dalam melakukan pendataan data peserta PKH yang berasal dari pusat, selalu melakukan koordinasi

dengan pihak desa untuk memastikan apakah data peserta PKH yang bersangkutan layak sebagai penerima PKH.

Para pendamping PKH sangat terbuka ketika ada peserta PKH yang memiliki kendala dalam kepesertaannya dan membantu peserta PKH yang memiliki kendala untuk diberi saran dan masukan sehingga persoalan tersebut dapat ditemukan solusinya.

## **6. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik**

Salah satu hal yang tidak kalah penting yang menjadi faktor penunjang kinerja pelaksanaan PKH bidang pendidikan di Kecamatan Sarang yaitu kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang kurang mendukung, akan berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan

Kondisi lingkungan para aktor kebijakan dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Sarang sangatlah berpengaruh. Dukungan dari para elit politik dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Sarang berjalan dengan

baik. Para aktor kebijakan saling menjalin kerjasama untuk menyukseskan pelaksanaan PKH di Kecamatan Sarang. Mereka melakukan kegiatan rapat koordinasi, kegiatan pendampingan, juga memonitoring setiap bantuan yang disalurkan.

Masyarakat penerima PKH juga berperan aktif untuk memenuhi kewajibannya sebagai peserta PKH, mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pendamping, dan sebagainya. Partisipasi aktif dari masyarakat penerima PKH Kecamatan Sarang ini mendorong terwujudnya keberhasilan PKH di Kecamatan Sarang.

## **KESIMPULAN**

### **1. Evaluasi Retrospektif Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan di Kecamatan Sarang dilihat dari evaluasi secara retrospektif sudah berjalan dengan baik dan sudah tepat sasaran sesuai dengan kriteria komponen peserta PKH, walaupun di lapangan masih ditemukan beberapa penerima PKH yang tidak tepat.

a. Pemetaan Sasaran

PKH bidang pendidikan di Kecamatan Sarang sudah mencapai 95% tepat sasaran sesuai dengan kriteria komponen peserta PKH, Tujuan dari PKH bidang pendidikan di Kecamatan Sarang sudah tercapai dengan baik. Masyarakat Penerima PKH dapat menyekolahkan anaknya sampai pada jenjang yang lebih tinggi.

b. Pemetaan Hambatan

Permasalahan dalam pelaksanaan PKH bidang pendidikan di Kecamatan Sarang yaitu terkait dengan ketepatan data penerima PKH yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, masalah pencairan dana yang mengalami keterlambatan dan pola pikir dari penerima PKH.

c. Analisis Dampak

Bantuan biaya PKH bidang pendidikan yang disalurkan kepada masyarakat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, akan tetapi terkadang dana bantuan digunakan untuk keperluan kebutuhan dasar dan kebutuhan pribadi penerima PKH.

## **2. Faktor Pendukung dan faktor penghambat Kinerja PKH Bidang Pendidikan di Kecamatan Sarang**

a. Standar dan sasaran kebijakan. penerima PKH di Kecamatan Sarang sudah tepat sasaran dan tujuan dari PKH di Kecamatan Sarang juga sudah tercapai.

b. Sumber daya. Penerima PKH sudah menjalankan kewajibannya untuk menyekolahkan anaknya hingga jenjang SMA. Pendamping PKH juga menyukseskan program agar mencapai tujuan dan meminimalisir ketidaktepatan sasaran program.

c. Hubungan antar organisasi yang terjalin sudah baik. Pendamping PKH memberikan sosialisasi pemahaman tentang PKH dan menangani kendala penerima PKH dengan respon yang baik.

d. Karakteristik agen pelaksana sudah baik. Para pendamping sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya.

e. Disposisi. Pelaksana kebijakan PKH sudah mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksinya dan mengacu pada SOP yang berlaku.

f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Koordinasi selalu dilakukan oleh para pelaksana agar pelaksanaan PKH mencapai tujuan. Strategi *on the track* juga diterapkan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan.

### **SARAN**

1. Program Keluarga Harapan untuk kedepannya lebih rutin untuk dilakukan kegiatan monitoring secara bertahap dari para pendamping PKH dengan peserta PKH untuk memastikan bahwa setiap tahap pencairan dana bantuan, peserta PKH telah menerima bantuan yang diberikan sesuai dengan kriteria komponen PKH sehingga tidak terjadi keterlambatan pencairan dana bantuan.
2. Proses pemutakhiran data untuk lebih dioptimalkan lagi dengan cara para pendamping PKH terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan ekonomi calon peserta PKH. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa peserta yang data dirinya termasuk dalam data

DTKS adalah benar-benar peserta yang layak mendapatkan bantuan PKH.

3. Penyadaran bagi penerima PKH untuk mau dilakukan graduasi kepesertaan PKH ketika keadaan ekonominya sudah meningkat.
4. Kegiatan pendampingan dan monitoring harus secara rutin dilakukan oleh pendamping PKH dengan penerima PKH untuk memastikan bahwa setiap dana bantuan yang diterima oleh penerima PKH sudah dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya.
5. Adanya koordinasi antara pihak pemerintah desa, dinas sosial, dan pihak penyalur (bank) dalam penyaluran bantuan PKH sehingga dapat dipastikan penerima PKH adalah mereka yang memenuhi kriteria penerima PKH dan berhak mendapatkan bantuan tersebut.
6. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian tentang evaluasi secara retrospektif Program Keluarga Harapan (PKH) dengan berfokus pada komponen program keluarga

harapan lainnya (kesehatan dan kesejahteraan sosial) sehingga dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan PKH dalam memberi dampak dan manfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabeta.
- Alexandri, M.B. (2020). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur Tahun 2019. Jurnal MODERAT, Volume 6, Nomor 2.
- Jayani, Dwi Hadya. 2019. Jumlah Penduduk Indonesia 269 juta Jiwa, Terbesar Keempat di Dunia, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlahpenduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia> (di akses pada 17 Maret 2021).
- Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. Yogyakarta : UGM Press.
- [pkh.kemensos.go.id](http://pkh.kemensos.go.id) (di akses pada 17 Maret 2021).
- Pratiwinegara, Agatha Idriani, dkk. (2015). Studi Intrumen Kebijakan Gerakan Terpadu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Lingkungan dan Infrastruktur (Gerdu Kampling) Kelurahan Bulusan Kota Semarang. Jurnal of Public Policy And Management Review. Volume 4, Nomor 2.
- Sari, A.G. dan Aufarul Marom. (2020) . Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Mengatasi Permasalahan Pendidikan Dan Kesehatan Di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Journal Of Public Policy And Management Review. Volume 9 nomor 1.
- Subarsono, AG. 2016. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Web Resmi BPS Kabupaten Rembang <https://rembangkab.bps.go.id/> (di akses pada 17 Maret 2021).
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Yogyakarta : Media Pressindo.